p-ISSN: 2088-8449
e-ISSN: 2527-4805

Pemetaan Wilayah dan Komoditas Perikanan Unggulan Berbasis Ekonomi Biru di Kabupaten Kotabaru

Mapping of Blue Economy- Based Leading Fisheries Areas and Commodities in Kotabaru Regency

***Hana Apriliani, Edgar Bayu Refansyah dan Rachmat Hidayat**

Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kotabaru
Jl. Megasari, Kec. Pulau Laut Utara, Kab. Kotabaru, Kalimantan Selatan, Indonesia

ARTICLE INFO

Diterima tanggal : 25 November 2025
Perbaikan naskah: 13 Maret 2026
Disetujui terbit : 25 Maret 2026

Korespodensi penulis:
Email: hanaapriliani9@gmail.com

DOI: http://dx.doi.org/10.15578/jsekp.v21i1.18516

ABSTRAK

Permasalahan utama dalam Pembangunan sektor perikanan di Kabupaten Kotabaru adalah pendekatan kebijakan yang cenderung seragam, mengabaikan perbedaan potensi riil antar wilayah dan dualisme kinerja antara sub-sektor tangkap dan budidaya. Kajian ini bertujuan memetakan spesialisasi dan dinamika sektor perikanan (Tangkap dan Budidaya) di Kabupaten Kotabaru, guna menyediakan landasan data empiris bagi perumusan kebijakan pembangunan sosial-ekonomi berbasis Ekonomi Biru yang selama ini cenderung pukulrata dan kurang efektif. Penelitian kuantitatif ini menggunakan pendekatan data panel periode 2020–2024 dari 22 kecamatan Kotabaru, yang dianalisis secara mendalam menggunakan *Location Quotient* (LQ), *Dynamic Location Quotient* (DLQ), dan *Shift-Share Analysis* (SSA). Hasilnya menegaskan adanya dualisme sektoral yang kritis: Sektor Tangkap didominasi oleh wilayah di Kuadran I SSA (*rapid growth, competitive*), menunjukkan posisi ideal Kotabaru. Sebaliknya, Sektor Budi daya menghadapi tekanan perlambatan pertumbuhan makro (nilai M negatif merata). Namun, ditemukan resiliensi luar biasa di Budidaya (Kelumpang Selatan/Hilir) yang berada di Kuadran II SSA (*slow growth, competitive*), berhasil melawan tren pasar yang lesu melalui keunggulan kompetitif lokal. Sementara itu, wilayah kepulauan Kuadran III Tangkap (misalnya Pulau Sembilan) menunjukkan kesempatan yang hilang akibat inefisiensi lokal (L negatif). Disimpulkan bahwa kebijakan Ekonomi Biru Asimetris harus segera diterapkan, dengan fokus pada Akselerasi Kuadran I dan Reformasi Struktural Kuadran III untuk mewujudkan transformasi sosial-ekonomi yang berkelanjutan.

Kata Kunci: ekonomi biru*; location quotient; shift-share;* tipologi klassen; sektor perikanan; Kotabaru

ABSTRACT

The main problem in the development of the fisheries sector in Kotabaru Regency is a policy approach that tends to be uniform, ignoring the disparities in real potential between regions and the dualism in performance between the capture and aquaculture sub-sectors. This study aims to map the specialization and dynamics of the fisheries sector (Capture and Aquaculture) in Kotabaru Regency, providing empirical data for formulating Blue Economy-based socio-economic development policies that have historically been generalized and ineffective. This quantitative research employs a panel data approach covering the 2020–2024 period across 22 sub-districts, analyzed in-depth using the Location Quotient (LQ), Dynamic Location Quotient (DLQ), and Shift-Share Analysis (SSA). The results confirm a critical sectoral dualism: The Capture Sector is dominated by regions in SSA Quadrant I (Rapid Growth, Competitive), affirming Kotabaru's ideal position. Conversely, the Aquaculture Sector faces macro-level growth pressure (widespread negative M values). However, outstanding resilience was discovered in Aquaculture (Kelumpang Selatan/Hilir) located in SSA Quadrant II (Slow Growth, Competitive), successfully countering the external market slowdown through superior local competitive advantage. Meanwhile, Capture Sector's Quadrant III islands (e.g., P. Sembilan) exhibit a 'lost opportunity' due to localized inefficiencies (negative L). It is concluded that an Asymmetric Blue Economy Policy must be implemented, focusing on Quadrant I Acceleration and Quadrant III Structural Reform to achieve sustainable socio-economic transformation.

Keywords: blue economy; location quotient; shift-share; klassen typology; fisheries sector; Kotabaru

PENDAHULUAN

Ekonomi biru dipahami sebagai konsep ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan laut (Keen *et al.,* 2018). Bank Dunia mendefinisikan ekonomi biru sebagai penggunaan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan mata pencaharian dan lapangan kerja, serta kesehatan ekosistem laut.

Implementasi dan pemahaman tentang ekonomi biru berbeda-beda dan mengacu sesuai dengan kondisi geopolitik dan sosio-ekonomi setiap negara (Cisneros-Montemayor *et al.,* 2021). Sebagai contoh, Uni Eropa menginterpretasikan ekonomi

biru sebagai pendorong dekarbonisasi dan inovasi teknologi yang berfokus pada energi laut terbarukan dan bioteknologi (European Commission, 2021). Negara kepulauan kecil berkembang (Small Island Developing Sates) merujuk pada pilar vital untuk ketahanan iklim, ketahan pangan, dan diversifikasi ekonomi (Amatillah *et al.,* 2023). Di Tiongkok, ekonomi biru dilihat sebagai peluang untuk mempromosikan modernisasi dari perspektif ekonomi, geopolitik, dan ekologi yang menghadirkan tantangan unik bagi tata kelola laut dunia (Urban, 2022). Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, mengadopsi ekonomi biru sebagai motor penggerak transformasi ekonomi menuju Visi Indonesia Emas 2045. Kerangka kerja tersebut di jabarkan melalui Peta Jalan Ekonomi Biru Indonesia termasuk pilar dasar sektor maritim, yang tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 (BAPPENAS, 2023). Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjabarkan melalui lima program prioritas, yaitu: (1) perluasan kawasan konservasi, (2) penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota, (3) pengembangan budi daya perikanan berkelanjutan, (4) pengelolaan berkelanjutan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta (5) penanganan sampah plastik di laut (Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP, 2022).

Data yang dikemukakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2022 menyatakan bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki garis pantai sepanjang 108.000 km dan luas wilayah laut mencapai 5,8 juta km^2(KKP, 2024). Kekayaan sumber daya kelautan dan pesisir yang melimpah menjadikan Indonesia memiliki potensi pengembangan ekonomi biru yang sangat besar, mencakup sektor perikanan dengan produksi mencapai 24,5 juta ton per tahun, pariwisata bahari yang berkontribusi terhadap devisa negara, industri maritim, serta energi terbarukan. Sektor kelautan menyumbang sekitar 20% untuk Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap lebih dari 7,4 juta tenaga kerja (Nur Ainun Musdalifah *et al.,* 2024). Berdasarkan hal tersebut, sektor perikanan dapat menjadi salah satu sektor pendapatan nasional signifikan. Akan tetapi, kinerjanya di tiap daerah bervariasi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kebijakan pemerintah, kondisi lingkungan dan permintaan pasar. Untuk menghadapi tantangan tersebut, beberapa negara menerapkan praktik perikanan berkelanjutan, pengelolaan berbasis ekosistem, dan peningkatan kapasitas bagi nelayan (Bista & Karki, 2022). Upaya tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan potensi sektor perikanan dan memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan yang signifikan (Riana *et al.,* 2025).

Sebagai salah satu provinsi dengan potensi maritim yang besar, Kalimantan Selatan yang memiliki panjang garis pantai 1306,32 km dihadapkan pada tantangan mengelola sumber daya laut dan pesisirnya secara berkelanjutan (MC Kalsel, 2024). Dari keseluruhan potensi maritim di Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru memegang peran sentral sebagai wilayah dengan garis pantai dan area laut terluas di Provinsi Kalimantan Selatan yaitu luas laut mencapai 384.900 hektar, panjang garis pantai 939,74 km, dan kontribusi produksi perikanan tangkap yang signifikan bagi Provinsi Kalimantan Selatan (BPK RI, n.d.). Selain itu, Kabupaten Kotabaru telah ditetapkan sebagai sentra kegiatan perikanan tangkap dan budi daya berbasis Ekonomi Biru dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2020 (Pemerintah Republik Indonesia, 2020) dan memiliki tujuan penataan ruang sebagai kawasan ekonomi biru dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2025-2044 Bab III Pasal 4 (Pemerintah Kabupaten Kotabaru, 2018). Akan tetapi, pengelolaan perikanan tangkap di Kabupaten Kotabaru masih memiliki beberapa permasalahan yaitu, (1) makin sedikitnya ikan karena maraknya *illegal fishing* yang terjadi di perairan Kotabaru yang dilakukan oleh nelayan dari luar yang memiliki armada lebih canggih. (2) Rendahnya kesadaran masyarakat tentang arti penting dan nilai strategis sumber daya kelautan dan perikanan bagi pembangunan ekonomi daerah, sehingga perhatian, pengetahuan (wawasan) dan penguasaan serta penerapan IPTEK kelautan dan perikanan juga menjadi rendah. (3) Aparatur pelayanan/penyuluhan baik secara kualitas dan kuantitas masih kurang (Iberahim, 2013). Selain itu, perikanan budi daya di kabupaten Kotabaru masih belum menjadi sektor unggulan dan gagal bersaing di pasar luar. Dari 22 kecamatan, hanya 3 kecamatan yang dapat diandalkan, yaitu Kecamatan Pulaulaut Timur, Sampanahan, dan Pamukan Selatan.

Dalam jurnal Marine Policy, Bennett *et al.* (2019) dalam artikelnya "*Just Transformations to Sustainability*", mengkritik bahwa narasi Ekonomi Biru seringkali bersifat *top-down*. Kebijakan ini memandang ruang laut sebagai ruang kosong yang siap diisi oleh investasi modal, mengabaikan hak kepemilikan adat dan praktik perikanan tradisional yang sudah ada. Akibatnya, kebijakan disamaratakan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi makro, namun mematikan ekonomi

p-ISSN: 2088-8449
e-ISSN: 2527-4805

mikro lokal yang unik (Bennet, *et al.,* 2019). Cohen *et al.* (2019) dalam Nature (artikel "*Securing a Just Space for Small-Scale Fisheries in the Blue Economy*") menjelaskan bahwa Ekonomi Biru sering kali bias terhadap sektor-sektor yang menghasilkan keuntungan besar (pertambangan laut, pariwisata mewah, perikanan industri). Kebijakan "pukul rata" menganggap nelayan kecil tidak efisien. Akibatnya, regulasi zonasi laut sering kali memukul rata pelarangan akses di area konservasi atau area industri, yang justru menyingkirkan nelayan lokal dari wilayah tangkap tradisional mereka (Cohen, *et al.,* 2019). Berangkat dari kritik tersebut, peneliti membangun asumsi bahwa perlunya pemetaan sektor perikanan tangkap dan budi daya di Kabupaten Kotabaru sebagai landasan pembangunan sosial ekonomi yang empiris dan berpijak pada data karakteristik wilayah riil serta komprehensif sesuai dengan daya dukung lingkungan yang spesifik. Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya bahwa pemetaan sektor perikanan menggunakan metode spasial penting untuk mengidentifikasi potensi besar perikanan di suatu wilayah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dikemukaan oleh (Hidayat *et al.,* 2022) dengan melakukan pemetaan spasial sektor perikanan potensial di Teluk Bone sebagai penghasil ikan pelagis dengan teknik identifikasi biologis menggunakan data satelit. Analisis spasial ini berhasil mengonfirmasi lokasi dan waktu spesifik terjadinya pengangkatan massa air kaya nutrisi, yang terbukti terjadi beberapa bulan sebelum puncak musim penangkapan ikan. Penelitian (Duda *et al.,* 2021), menganalisis spasial "*riverscape survey*" (survei snorkeling kontinu) untuk memetakan distribusi dan kepadatan ikan di 65 km Sungai Elwha sebelum dan sesudah pembongkaran bendungan.

Setiap kecamatan di Kotabaru memiliki karakteristik dan potensi unik tiap wilayah . Secara empiris, potensi perikanan di Kabupaten Kotabaru terbagi dalam tiga tipologi ekologis yang berbeda. Pertama, wilayah kepulauan terluar seperti Kecamatan Pulau Sembilan dan Pulaulaut Kepulauan yang memiliki karakteristik laut dalam, yang berfungsi sebagai basis penangkapan ikan palagis besar serta sentra budi daya rumput laut. Kedua, wilayah pesisir dan selat seperti Pulaulaut Timur dan Pulaulaut Utara, yang didominasi oleh perikanan pelagis kecil dan budi daya Keramba Jaring Apung. Ketiga, Kawasan estuari diwilayah Kelumpang dan Pamukan (daratan Pulau Kalimantan) yang memiliki ekosistem mangrove luas, menjadikannya habitat alami yang unik bagi komoditas bernilai ekonomi tinggi seperti Kepiting Bakau dan udang, serta basis utama pertambakan air payau. Tantangan lain seperti degradasi ekosistem laut yang dikemukakan oleh (Kaunar *et al.,* 2022) dalam Jurnal Kelautan Tropis bahwa ekosistem pesisir Kabupaten Kotabaru menghadapi tekanan ganda. Di satu sisi, faktor antropogenik seperti overfishing pada komoditas rajungan dengan laju eksploitasi E>0,68 (Kaunar *et al.,* 2022) dan sedimentasi akibat aktivitas tambang/Perusahaan sawit di hulu (di muara Sampanahan) (TVRINews, 2022) menurunkan daya dukung lingkungan. Di sisi lain, tekanan alami telah memicu fenomena *major bleaching* pada terumbu karang di Sarang Tiung dengan kerusakan mencapai 39% (Syahdan *et al.,* 2023), ketimpangan akses sumber daya bagi masyarakat lokal, dan kurangnya koordinasi antara pemangku kepentingan. Untuk menerapkan kebijakan Ekonomi Biru yang efektif, langkah awalnya adalah mengidentifikasi spesialisasi wilayah (basis ekonomi). Dikemukakan oleh Mulazzani dan Malorgio bahwa inisiatif Ekonomi Biru di Eropa (seperti di Laut Adriatik-Ionia) hanya berhasil Ketika menerapkan pendekatan berbasis tempat (*place-based approach*). Wilayah yang mengidentifikasi spesialisasi spesfik lebih sukses dalam menarik investasi daripada wilayah yang mengembangkan semua sektor sekaligus tanpa fokus. Tanpa pemetaan spasial, Pemerintah tidak dapat mengidentifikasi *provision space* yang optimal maupun menghitung biaya degradasi lingkungan yang terjadi di lokasi spesifik, sehingga sulit mencapai *adjusted net value added* yang menjadi indikator keberhasilan Ekonomi Biru (Mulazzani & Malorgio, 2017). Pembentukan klaster maritim diawali dengan pemetaan potensi lokal dengan meningkatkan daya saing melalui aglomerasi. Sehingga potensi unik tiap wilayah dapat dimanfaatkan serta inovasi dapat berkembang. Berdasarkan hal tersebut, peneliti akan menggunakan Analisis *Location Quotient* (LQ) yang terdiri dari *Static Location Quotient* (SLQ) dan *Dynamic Location Quotient* (LQ) untuk mengidentifikasi sektor basis dan melihat pergeserannya dari waktu ke waktu serta analisis tipologi Klassen dari hasil SLQ dan DLQ. Selain itu analisis *Shift-Share* akan digunakan untuk membedah penyebab pertumbuhan atau kemunduran sektor perikanan di setiap kecamatan.

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan yang terdiri atas 22 kecamatan. Secara geografis, Kabupaten Kotabaru berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur di sebelah utara, sebelah selatan dengan

Laut Jawa, sebelah timur dengan Laut Makassar dan sebelah barat dengan Kabupaten Balangan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Bumbu. Kondisi bentang alam Kabupaten Kotabaru terdiri dari pegunungan dan daerah pantai (genangan) serta daratan dan pulau-pulau kecil tersebar. Secara administratif, Kabupaten Kotabaru memiliki luas wilayah sebesar 935,569,92 hektar dan menjadi wilayah terluas di Provinsi Kalimantan Selatan dengan persentase sebesar 25,19%. Sebagai wilayah yang berbentuk kepulauan, Kabupaten Kotabaru memiliki garis pantai terpanjang di Provinsi Kalimantan Selatan. Dari 1.306,32 km panjang garis pantai di Provinsi Kalimantan Selatan, 71,95% garis pantai terdapat di Kabupaten Kotabaru yang secara keseluruhan memiliki garis pantai sepanjang 939,74 km. Berdasarkan kondisi geografisnya, dari 22 kecamatan yang ada, terdapat 18 kecamatan yang memiliki garis pantai (Bapperida Kotabaru, 2024). Penelitian dilakukan mulai dari bulan Oktober sampai bulan November 2025 di Kabupaten Kotabaru. Lebih lanjut, lokasi penelitian dapat dilihat pada Gambar 1.

Jenis dan Metode Pengambilan Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis dan memetakan potensi sektor perikanan di Kabupaten Kotabaru. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti Dinas Perikanan Kabupaten Kotabaru dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotabaru.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data panel, yaitu gabungan antara data runut waktu (*time-series*) dan data antar wilayah (*cross-section*). Data *time series* mencakup rentang waktu 5 tahun dari tahun 2020-2024. Sedangkan data *cross section* mencakup data di seluruh kecamatan di Kabupaten Kotabaru yang memiliki aktivitas perikanan.

Data pilar ekonomi (pertumbuhan dan spesialisasi) untuk menganalisis *Location Quotient* (LQ), *Dynamic Location Quotient* (DLQ), dan *Shift Share*. Data pilar sosial (inklusi dan kesejahteraan) untuk mengukur dampak sosial dan tingkat kesejahteraan (produksi tenaga kerja). Data pilar lingkungan (jejak dan produktivitas ruang), digunakan untuk mengukur intensitas dan efisiensi pemanfaatan ruang (produktivitas lahan). Seluruh data tersebut dikumpulkan pada level kecamatan untuk dilakukan analisis spasial dan pemetaan tipologi wilayah.

Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kuantitatif dengan menggunakan beberapa alat analisis ekonomi regional dan statistik deskriptif. Tujuan analisis ini adalah untuk memetakan spesialisasi ekonomi (pilar ekonomi di setiap kecamatan di Kabupaten Kotabaru.

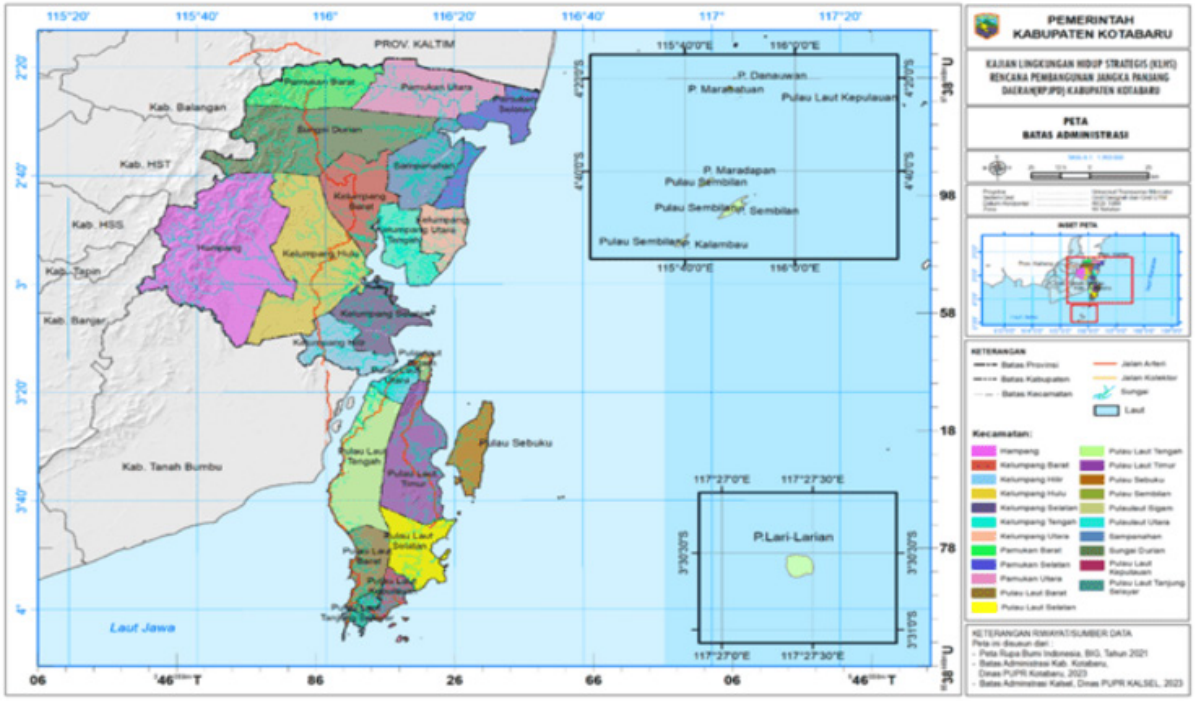

Gambar 1. Peta Administratif Kabupaten Kotabaru.

p-ISSN: 2088-8449
e-ISSN: 2527-4805

Analisis Pilar Ekonomi (Pertumbuhan dan Spesialisasi)

Data yang digunakan adalah data panel (2020-2024) per kecamatan untuk data produksi perikanan tangkap, perikanan budi daya.

1. Analisis *Location Quotient (LQ)*

a. Analisis *Static Location Quotient (SLQ)*

Analisis SLQ digunakan untuk menentukan basis ekonomi suatu daerah. Analisis LQ digunakan untuk mengetahui kontribusi suatu daerah sebagai pemasok atau pengguna atas suatu aktivitas atau sektor ekonomi (Pribadi & Nurbiyanto, 2021). Analisis SLQ pada penelitian ini mengidentifikasi peran sektor perikanan (tangkap dan budi daya) di setiap kecamatan (sub-wilayah) dibandingkan dengan perannya di Kabupaten Kotabaru (wilayah referensi). Aspek dari analisis SLQ Adalah sebagai salah satu indikator untuk menentukan sektor unggulan (Basuki, 2017), mengukur kegiatan ekonomi untuk ditetapkan sebagai *leading sector* suatu kegiatan ekonomi (Jumiyanti, 2018). Adapun rumus dari analisis SLQ (Glasson, 1978) adalah sebagai berikut:

$$SLQ = \frac{\frac{Xij}{RVj}}{\frac{Xi}{RV}} \quad \text{.....(1)}$$

Keterangan:

SLQ = Nilai *Static Location Quotient* sektor *i* (tangkap/ budi daya) di kecamatan *j*

Xij = Nilai produksi sektor *i* (tangkap/budi daya) di kecamatan *j*

Xi = Total nilai produksi seluruh sektor perikanan (tangkap + budi daya) di kabupaten kotabaru

RVj = Total nilai produksi sektor *i* (tangkap/budi daya) di kecamatan j

RV = Total nilai produksi seluruh sektor perikanan (tangkap+ budi daya) di Kabupaten Kotabaru

Jika hasil perhitungan diformulasi menghasilkan:

LQ > 1 artinya, komoditas perikanan tangkap/budi daya tersebut menjadi basis atau menjadi bagian dari sumber pertumbuhan. Komoditas memiliki keunggulan komparatif.

LQ = 1 artinya komoditas perikanan tangkap/budi daya tergolong non-basis, tidak memiliki keunggulan komparatif

LQ < 1 berarti komoditas perikanan tangkap/budi daya ini juga bukan termasuk non-basis.

b. Analisis *Dynamic Location Quotient* (DLQ)

Metode *Dynamic Location Quotien*t (DLQ) adalah alternatif untuk melengkapi analisis LQ. Analisis DLQ digunakan untuk mengidentifikasi perubahan dalam spesialisasi dan keunggulan kompetitif sektor ekonomi di wilayah penelitian (Hidayat & Kholis, 2020), yaitu Kabupaten Kotabaru dari waktu ke waktu. Dengan mengkombinasikan LQ dan DLQ, pengambil kebijakan dapat menilai peran suatu sektor ekonomi dalam perekonomian termasuk prospek sektor tersebut di masa depan (Pribadi & Nurbiyanto, 2021). Perhitungan dapat dihitung menggunakan rumus:

$$DLQ = ((1 + gij)/(1 + gj))/ ((1 + gtp)/(1 + gp)) \quad \text{.....(2)}$$

Keterangan:

DLQ = Kofisien DLQ sektor *i* di kecamatan *j* pada tahun akhir (t= 2024)

gij = Nilai Produksi sektor *i* di kecamatan *j* pada tahun 2024

gj = Total Nilai Produksi seluruh sektor perikanan (tangkap + budi daya) di kecamatan *j* pada tahun 2024

gtp = Total Nilai Produksi sektor *i* di Kabupaten Kotabaru pada tahun 2024

gp = Total Nilai Produksi seluruh sektor perikanan di Kabupaten Kotabaru pada tahun 2024

t = Waktu (tahun)

Nilai DLQ > 1 menunjukkan bahwa sektor yang diteliti di wilayah Kabupaten Kotabaru potensial untuk dikembangkan atau bersifat prospektif. Sebaliknya jika nilai DLQ < 1, maka sektor yang diteliti tersebut tidak prospektif untuk menjadi sektor bais ekonomi di Kabupaten Kotabaru.

c. Analisis Tipologi Klassen

Metode Analisa Tipologi Klassen merupakan alat analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi sektor, subsektor, usaha atau komoditi unggulan di suatu daerah (Kurniati, 2020). Kombinasi nilai SLQ dan DLQ digunakan sebagai dasar untuk mengelompokkan masing-masing aktivitas ekonomi dalam Tipologi Klassen. Analisis Tipologi Klasen memuat empat kuadran proyeksi sektor ekonomi berdasarkan perhitungan LQ dan DLQ (Sari & Syafii, 2021) dapat dilihat pada Gambar 2.

Kuadran II Sektor Nonbasis, Prospektif LQ<1, DLQ>1	**Kuadran I** Sektor Basis, Prospektif SLQ>1, DLQ>1
Kuadran III Sektor Basis, Non Prospektif LQ>1, DLQ<1	**Kuadran IV** Sektor Nonbasis, Non Prospektif LQ<1, DLQ<1

Gambar 2. Bagan Tipologi Klassen.
Sumber: BPS Jateng, 2024.

2. Analisis *Shift-Share* (SSA)

Kinerja dan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah memiliki beberapa dimensi pengukuran, salah satu alat ukurnya adalah metode *Shift-Share* (Arsyad, 1999). Pada dasarnya, analisis *Shift-Share* merupakan analisis yang membandingkan laju pertumbuhan ekonomi di suatu lokasi/ daerah dengan lingkup lokasi/daerah yang lebih luas (Rizani, 2021). Dalam penelitian ini, laju pertumbuhan kecamatan pada sektor perikanan tangkap dan budi daya dapat diketahui dengan membandingkan laju pertumbuhan pada sektor perikanan tangkap dan budi daya di Kabupaten Kotabaru. Untuk mengetahui perubahan nilai produksi (*Dij*) sektor *i* di kecamatan *j* selama tahun 2020-2024 yaitu dengan rumus berikut:

$$Dij = Nij + Mij + Cij \quad \text{.....(3)}$$

Keterangan:
Dij = Perubahan nilai produksi sektor *i* di wilayah *j* (Kabupaten) dari tahun awal *(t-1)* ke tahun akhir *(t)*
Nij = Komponen Pertumbuhan Kabupaten
Mij = Komponen Bauran Industri
Cij = Komponen Keunggulan Kompetitif

Rumus menghitung Komponen Pertumbuhan (*Nij*), Komponen Bauran Industri (*Mij*) dan Komponen Keunggulan Kompetitif (*Cij*) Kabupaten yaitu:

$$N_{ij} = Eij(t-1)\ x\ Rn \quad \text{.....(4)}$$

$$M_{ij} = Eij(t-1)\ x\ (Rin - Rn) \quad \text{....(5)}$$

$$C_{ij} = Eij(t-1)\ x\ (Rij - Rin) \quad \text{.....(6)}$$

Keterangan:
Eij(t-1) = Nilai produksi sektor i (tangkap/budi daya) di wilayah j pada tahun awal analisis
Rij = Laju pertumbuhan sektor i (tangkap/budi daya) di wilayah j (kecamatan)
Rin = Laju pertumbuhan sektor i (tangkap/budi daya) di wilayah kabupaten
Rn = Laju pertumbuhan sektor i (tangkap/budi daya) di wilayah kabupaten

dengan penjelasan bahwa jika D positif, maka kecamatan *i* mempunyai daya saing unggul. Sedangkan jika D negatif, artinya kecamatan *i* kalah bersaing atau terdapat masalah lokal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis *Static Location Quotient* (SLQ) dan *Dynamic Location Quotient* (DLQ)

Analisis empiris sektor perikanan budi daya menggunakan metode *Static Location Quotient* (LQ) dan *Dynamic Location Quotient* (DLQ) pada subsektor budi daya ini memetakan struktur s pasial ekonomi perikanan Kabupaten Kotabaru ke dalam zonasi yang krusial bagi penerapan Ekonomi Biru. Temuan utama menunjukkan terbentuknya klaster basis dan prospektif yang solid di Kecamatan Kelumpang Hilir, Kelumpang Selatan, Sampanahan, Pulaulaut Sigam, dan Pulau laut Timur. Wilayah-wilayah ini bertindak sebagai *prime mover* (penggerak utama) karena memiliki keunggulan komparatif sekaligus daya saing pertumbuhan masa depan yang tinggi, dengan tingkat spesialisasi produksi paling ekstrem terpusat di Kecamatan Kelumpang Hilir dan Kecamatan Sampanahan. Sebaliknya, analisis ini memberikan peringatan dini bagi Pamukan Selatan yang berstatus basis namun non prospektif, mengindikasikan gejala saturasi atau *diminishing return* yang memerlukan intervensi revitalisasi teknologi agar tidak kehilangan relevansi ekonominya.

Di sisi lain, dinamika menarik terlihat pada Sungai Durian yang muncul sebagai anomali positif atau emerging market (non basis, prospektif), menandakan adanya pertumbuhan baru yang layak mendapatkan insentif infrastruktur. Namun, ketimpangan wilayah masih terlihat nyata karena mayoritas kepulauan luar seperti Pulau Sembilan hingga Pulau Sebuku masih terperangkap di kuadran non basis, non prospektif.

p-ISSN: 2088-8449
e-ISSN: 2527-4805

Tabel 1. Hasil Analisis SLQ dan DLQ Sektor Perikanan Budi Daya.

No	Kecamatan	Rata-Rata SLQ	Basis/Non Basis	Analisis DLQ	Intepretasi
1	Pulau Sembilan	0,0004	Non basis	0,0000	Non Basis, Non Prospektif
2	Pulaulaut Tanjung Selayar	0,0139	Non basis	0,0002	Non Basis, Non Prospektif
3	Pulaulaut Barat	0,0140	Non basis	0,0000	Non Basis, Non Prospektif
4	Pulaulaut Selatan	0,0006	Non basis	0,0011	Non Basis, Non Prospektif
5	Pulaulaut Kepulauan	0,0005	Non basis	0,0009	Non Basis, Non Prospektif
6	Pulaulaut Timur	1,6320	Basis	1,7579	Basis, Prospektif
7	Pulau Sebuku	0,0000	Non basis	0,0000	Non Basis, Non Prospektif
8	Pulaulaut Utara	0,0759	Non basis	0,0301	Non Basis, Non Prospektif
9	Pulaulaut Tengah	0,3049	Non basis	0,3584	Non Basis, Non Prospektif
10	Pulaulaut Sigam	1,1409	Basis	2,2822	Basis, Prospektif
11	Kelumpang Selatan	2,0123	Basis	2,4161	Basis, Prospektif
12	Kelumpang Hilir	2,4886	Basis	2,4224	Basis, Prospektif
13	Kelumpang Hulu	0,0698	Non basis	0,0000	Non Basis, Non Prospektif
14	Kelumpang Barat	0,0000	Non basis	0,0000	Non Basis, Non Prospektif
15	Hampang	0,2847	Non basis	0,0000	Non Basis, Non Prospektif
16	Sungai Durian	0,0000	Non basis	1,1290	Non Basis, Prospektif
17	Kelumpang Tengah	0,0258	Non basis	0,1197	Non Basis, Prospektif
18	Kelumpang Utara	0,0385	Non basis	0,1037	Non Basis, Prospektif
19	Pamukan Selatan	2,6550	Basis	0,3535	Basis, Non Prospektif
20	Sampanahan	2,4560	Basis	1,9439	Basis, Prospektif
21	Pamukan Utara	0,0000	Non basis	0,0000	Non Basis, Non Prospektif
22	Pamukan Barat	0,0000	Non basis	0,0000	Non Basis, Non Prospektif

Sumber: Data diolah, 2025.

Tabel 2. Hasil Analisis SLQ dan DLQ Perikanan Sektor Tangkap.

No	Kecamatan	Rata-Rata SLQ	Basis/Non Basis	Analisis DLQ	Intepretasi
1	Pulau Sembilan	1,3121	Basis	0,7261	Basis, Non Prospektif
2	Pulaulaut Tanjung Selayar	1,3067	Basis	1,2261	Basis, Prospektif
3	Pulaulaut Barat	1,3066	Basis	1,2261	Basis, Prospektif
4	Pulaulaut Selatan	1,3120	Basis	0,8226	Basis, Non Prospektif
5	Pulaulaut Kepulauan	1,3121	Basis	1,2259	Basis, Prospektif
6	Pulaulaut Timur	0,8135	Non Basis	0,8287	Non Basis, Non Prospektif
7	Pulau Sebuku	1,3122	Basis	1,2261	Basis, Prospektif
8	Pulaulaut Utara	1,2846	Basis	0,6219	Basis, Non Prospektif
9	Pulaulaut Tengah	1,2216	Basis	1,1451	Basis, Prospektif
10	Pulaulaut Sigam	1,3121	Basis	0,7101	Basis, Non Prospektif
11	Kelumpang Selatan	0,7187	Non Basis	0,6798	Non Basis, Non Prospektif
12	Kelumpang Hilir	0,5295	Non Basis	0,6784	Non Basis, Non Prospektif
13	Kelumpang Hulu	1,2844	Basis	1,2261	Basis, Prospektif
14	Kelumpang Barat	1,3122	Basis	1,2261	Basis, Prospektif
15	Hampang	0,1988	Non Basis	1,2261	Non Basis, Prospektif
16	Sungai Durian	0,3122	Non Basis	1,2261	Non Basis, Prospektif
17	Kelumpang Tengah	1,3028	Basis	1,2239	Basis, Prospektif
18	Kelumpang Utara	1,3035	Basis	1,2087	Basis, Prospektif
19	Pamukan Selatan	1,4774	Basis	0,6411	Basis, Prospektif
20	Sampanahan	1,5013	Basis	0,7866	Basis, Prospektif
21	Pamukan Utara	1,3122	Basis	1,2261	Basis, Prospektif
22	Pamukan Barat	0,6373	Non Basis	1,2261	Non Basis, Prospektif

Sumber: Data diolah, 2025.

Hasil analisis SLQ dan DLQ pada sektor perikanan tangkap yang lebih dinamis dan tersebar luas dibandingkan subsektor sebelumnya, di mana kuadran basis dan prospektif mendominasi secara signifikan pada gugus pulau-pulau kecil (seperti Pulaulaut Tanjung Selayar, Pulaulaut Barat, Pulau Sebuku) serta wilayah pesisir utara (Kelumpang Hulu, Tengah, Utara, dan Pamukan Utara). Konsentrasi keunggulan ini menegaskan bahwa *core competency* sektor ini sejatinya berada pada sabuk pesisir dan kepulauan luar, menjadikannya kandidat utama untuk penetapan zona inti Ekonomi Biru yang agresif. Namun, data ini juga menyalakan lampu kuning bagi sentra produksi tradisional yang memiliki spesialisasi tertinggi seperti Sampanahan (LQ 1,50) dan Pamukan Selatan (LQ 1,47), serta pusat aktivitas di Pulaulaut Sigam; wilayah-wilayah ini berstatus non prospektif, mengindikasikan urgensi rekayasa ulang kebijakan atau hilirisasi produk untuk melawan stagnasi pasar dan kejenuhan daya dukung. Fenomena menarik lainnya adalah munculnya Hampang, Sungai Durian, dan Pamukan Barat sebagai *Rising Stars* (Non Basis, Prospektif), yang meskipun kontribusi aktualnya saat ini minim (LQ < 1), menunjukkan daya ungkit pertumbuhan tinggi yang strategis untuk pemerataan ekonomi wilayah *hinterland* atau pedalaman.

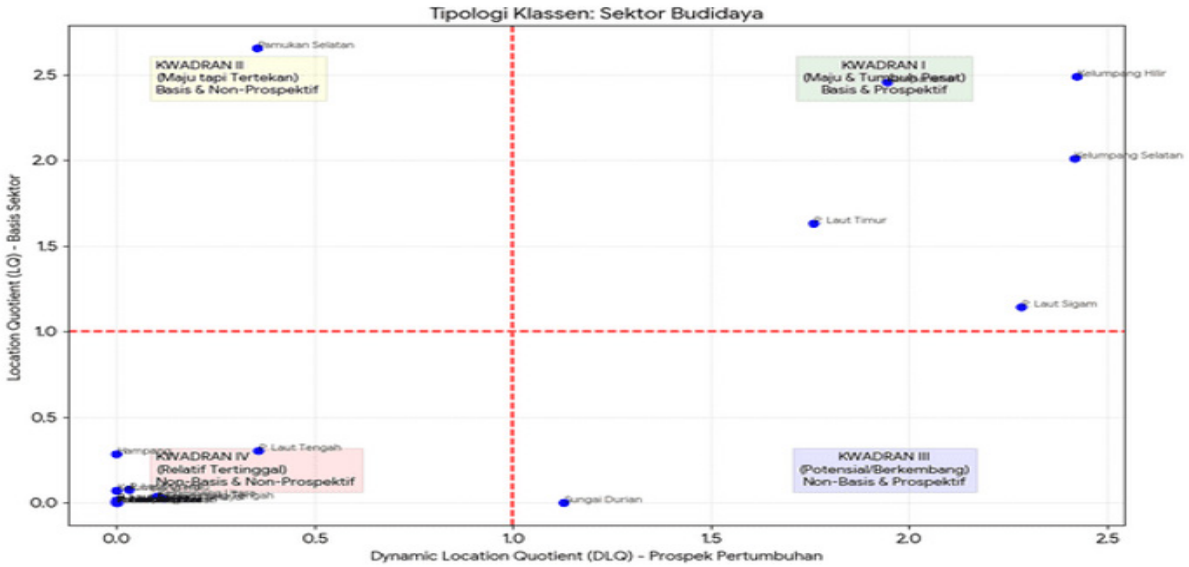

Gambar 3. Bagan Tipologi Klassen Sektor Budi Daya.
Sumber: Data diolah, 2025.

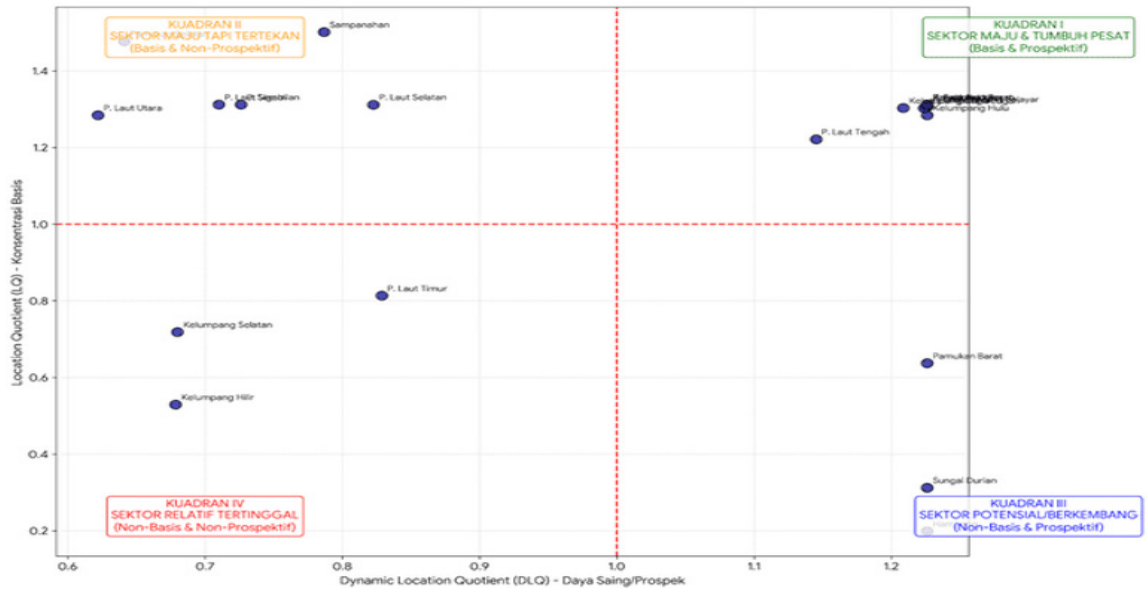

Gambar 4. Bagan Tipologi Klassen Sektor Tangkap.
Sumber: Data diolah, 2025.

p-ISSN: 2088-8449
e-ISSN: 2527-4805

Sektor Budi daya memiliki konsentrasi spasial yang sangat jelas di wilayah daratan (Kelumpang & Sampanahan), sementara banyak wilayah kepulauan tertinggal. Ini menunjukkan spesialisasi yang tinggi. Keterangan tersebut dapat dilihat lebih jelas melalui gambar berikut.

Gambar 5. Peta Prospektif Sektor Budi Daya.
Sumber: Data diolah, 2025.

Sedangkan Sektor Perikanan Tangkap jauh lebih merata, dengan banyak kecamatan di kepulauan (Pulau Sebuku, Pulaulaut Barat) masuk dalam kategori Maju & Tumbuh Pesat. Namun, pusat-pusat lama seperti Pulaulaut Sigam dan Sampanahan menunjukkan tanda-tanda jenuh (maju namun terhambat), yang memerlukan kebijakan yang tepat agar sektor di dua Kecamatan tersebut dapat terus tumbuh. Keterangan tersebut dapat dilihat lebih jelas melalui gambar berikut.

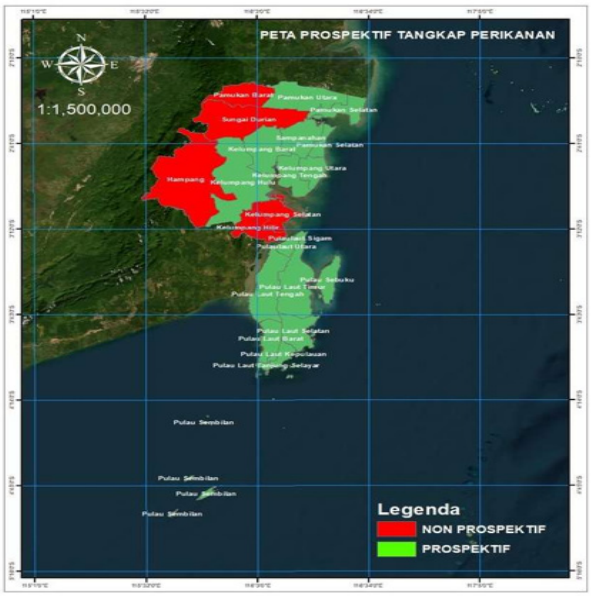

Gambar 6. Peta Prospektif Sektor Tangkap.
Sumber: Data diolah, 2025.

Analisis *Shift-Share*

Analisis *Shift-Share* pada penelitian ini mengadaptasi Plotting Shift-Share Kalsik. Dalam penelitian ini, penentuan kuadran didasarkan pada sistem koordinat Kartesius standar dengan sumbu vertikal (y) sebagai komponen *Proportional Shift* (M) dan sumbu horizontal (x) sebagai *Diferential Shift* (L), dengan pembagian sebagai berikut.

1. Kuadran I (posisi kanan atas): karakteristik M (+), L (+). Sektor tumbuh maju dan cepat (*rapid growth, competitive*);
2. Kuadran II (posisi kiri atas): karakteristik M (+), L (-). Sektor sedang berkembang, tapi daerah kalah bersaing/tidak efisien. (*rapid growth, non-competitive*);
3. Kuadran III (posisi kiri bawah): karakteristik: M (-), L (-). Sektor relative tertinggal, daerah juga tidak kompetitif. (*slow growth, non-competitive*);
4. Kuadran IV (posisi kanan bawah): M (-), L (+). Sektor melambat secara nasional, tapi daerah punya keunggulan kuat/resiliensi. (*slow growth, competitive*).

a. Analisis *Shift-Share*: Sektor Perikanan Tangkap

Sektor ini secara umum menunjukkan dinamika pertumbuhan yang sangat positif (sebagian besar nilai M positif), sehingga mayoritas kecamatan berada di kuadran pertumbuhan cepat.

Kuadran I (*rapid growth, competitive*). Kuadran I memiliki kriteria pertumbuhan sektoral cepat (M > 0) & kompetitif (L > 0). Pada Kuadran I terdapat kecamatan Pulaulaut Barat, Pulaulaut Timur, Pulaulaut Utara, Kelumpang Selatan, Kelumpang Hilir, Kelumpang Barat, Hampang, Sungai Durian, Kelumpang Tengah, Kelumpang Utara, Pamukan Selatan, Sampanahan, Pamukan Utara, Pamukan Barat. Kecamtan yang berada di kuadran I merupakan kondisi ideal. Kecamatan tersebut tidak hanya berada di sektor yang sedang meningkat secara makro, tetapi juga memiliki keunggulan kompetitif lokal yang kuat. Kecamatan yang berada di kuadran I adalah mesin pertumbuhan utama perikanan tangkap di Kotabaru. Strategi di sini adalah ekspansi agresif dan hilirisasi produk untuk memaksimalkan momentum positif ini.

Kuadran II (*slow growth, competitive*). Tidak ada Kecamatan yang masuk dalam kategori kuadran II karena secara umum sektor perikanan tangkap sedang mengalami pertumbuhan cepat (rapid growth) di tingkat agregat, sehingga tidak ada yang terjebak dalam pertumbuhan lambat namun kompetitif.

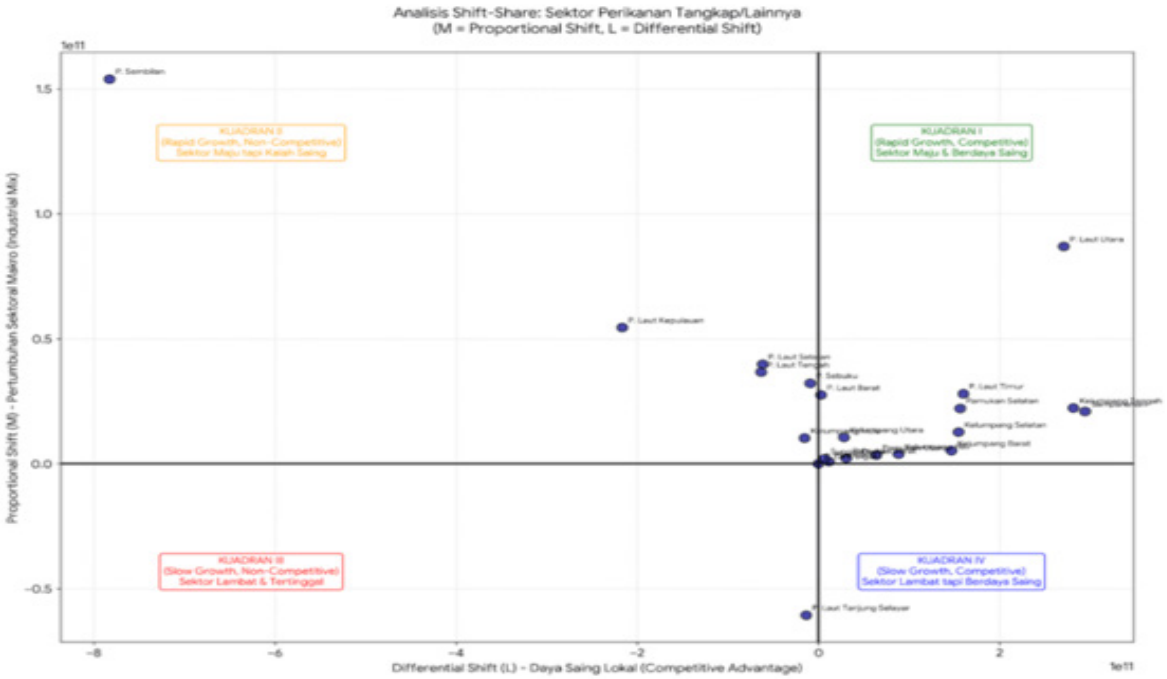

Gambar 7. Kuadran dari Analisis Shift-Share (SSA) Sektor Tangkap.
Sumber: Data diolah, 2025.

Kuadran III (*rapid growth, non-competitive*) memiliki kriteria pertumbuhan sektoral cepat (M > 0) tapi tidak kompetitif (L < 0). Kecamtan yang terdapat di kuadran III yaitu Pulau Sembilan, Pulaulaut Selatan, Pulaulaut Kepulauan, Pulau Sebuku, Pulaulaut Tengah, Kelumpang Hulu. merupakan wilayah *Lost Opportunity*. Kuadran III berarti meskipun pasar perikanan tangkap sedang tumbuh pesat, kecamatan-kecamatan ini gagal memanfaatkannya secara optimal karena inefisiensi lokal atau kalah bersaing. Kebijakan harus fokus pada pembenahan fundamental (infrastruktur, teknologi tangkap, SDM) untuk mengubah L negatif menjadi positif dan naik kelas ke Kuadran I.

Kuadran IV (*slow growth, non-competitive*) berarti pertumbuhan sektoral lambat (M < 0) & tidak kompetitif (L < 0). Kecamatan yang terdapat dalam Kuadran IV yakni Pulaulaut Tanjung Selayar. Pulaulaut Tanjung Selayar menghadapi tekanan ganda yaitu sektornya melambat secara spesifik di wilayah ini (tercermin dari M negatif yang anomali dibanding kecamatan lain) dan daya saingnya lemah. Perlu evaluasi mendalam apakah sektor tangkap masih layak menjadi prioritas utama atau perlu diversifikasi ke sektor lain.

b. Analisis *Shift-Share*: Sektor Budi Daya

Kuadran I *rapid growth, competitive* (M+, L+) Kuadran I merupakan posisi Ideal. Kecamatan di sini berada di sektor yang tumbuh cepat secara nasional/ makro dan memiliki keunggulan kompetitif lokal. Pamukan Selatan dan Sampanahan dikonfirmasi berada di sektor yang tumbuh cepat (M positif) dan memiliki daya saing yang kuat (L positif). Hal ini menjadikannya lokomotif pertumbuhan subsektor budi daya Kotabaru. Rekomendasi kebijakan agar memfokuskan investasi infrastruktur pendukung hilirisasi dan perluasan kapasitas produksi di dua wilayah ini.

Kuadran II *slow growth, competitive* (M-, L+). Kuadran II adalah posisi resiliensi (benteng pertahanan). Meskipun sektor budi daya melambat secara makro (M negatif), kecamatan-kecamatan ini tetap mampu tumbuh karena efisiensi atau keunggulan komparatif lokal yang superior (L positif). Kecamatan yang berada di Kuadran II yakni Pulaulaut Timur, Kelumpang Selatan, Kelumpang Hilir. Ketiga wilayah ini adalah bukti ketahanan. Mereka berhasil melawan perlambatan pertumbuhan eksternal. Keunggulan lokal mereka (mungkin kualitas lahan, SDM, atau teknologi) harus dipertahankan. Rekomendasi bagi Kecamatan yang berada di Kuadran II yaitu agar melindungi keunggulan lokal, fokus pada peningkatan efisiensi (pengurangan biaya) dan peningkatan mutu produk (sertifikasi) agar tetap kompetitif.

Kuadran III *rapid growth, non-competitive* (M+, L-), posisii adalah berarti kesempatan yang hilang (*lost opportunity*). Sektor tumbuh cepat, tetapi kecamatan kalah bersaing. Tidak Ada kecamatan

p-ISSN: 2088-8449
e-ISSN: 2527-4805

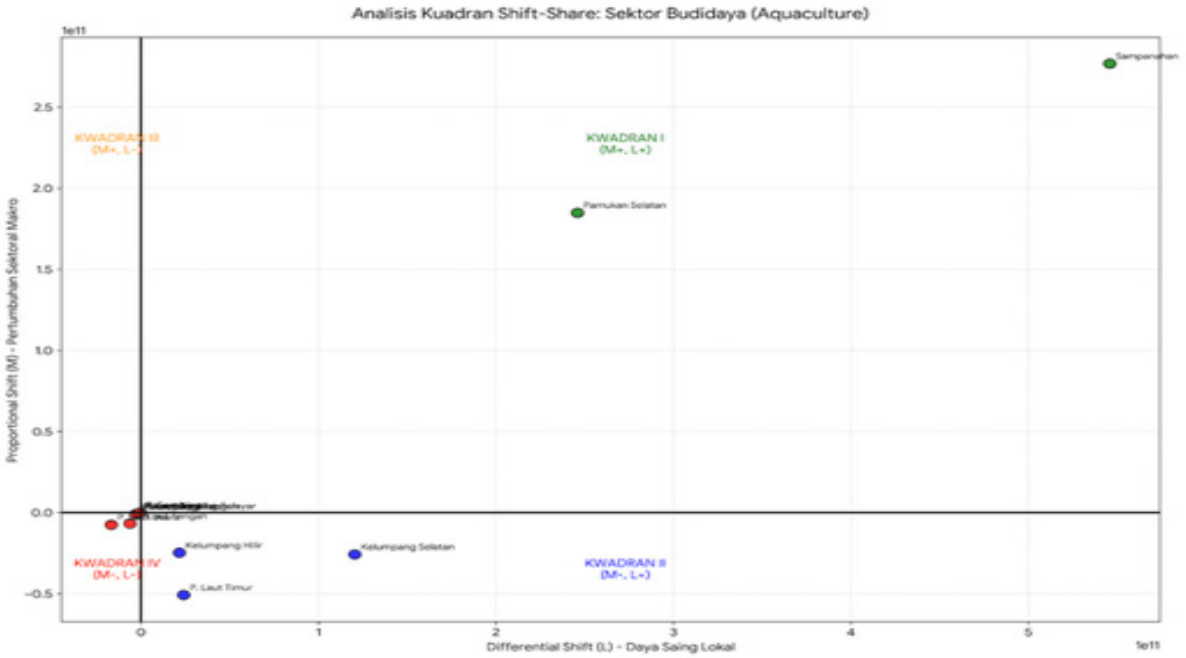

Gambar 8. Kuadran dari Analisis Shift-Share (SSA) Sektor Budi Daya.
Sumber: Data diolah, 2025.

yang masuk dalam kuadran ini, yang berarti jika pasar sedang tumbuh, wilayah cenderung kompetitif (Q1).

Kuadran IV *slow growth, non-competitive* (M-, L-), kuadran IV merupakan posisi tertinggal. Sektor melambat dan kecamatan tidak kompetitif. Kecamatan yang terdapat dalam Kuadran IV adalah Pulaulaut Sembilan, Pulaulaut Tanjung Selayar, Pulaulaut Barat, Pulaulaut Utara, Pulaulaut Tengah, Kelumpang Hulu, Hampang, Kelumpang Tengah. Wilayah-wilayah ini terpukul ganda. Mengingat sebagian besar adalah wilayah kepulauan/*hinterland*, wilayah tersebut mungkin menghadapi masalah logistik parah atau kondisi lingkungan yang kurang cocok untuk budi daya intensif. Perlu evaluasi mendalam dan mempertimbangkan untuk mengalihkan sumber daya ke subsektor perikanan lain yang lebih prospektif (misalnya perikanan tangkap) atau menerapkan teknologi budi daya skala kecil untuk ketahanan pangan lokal.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

Simpulan

Analisis LQ dan DLQ mengidentifikasi dualitas spasial, menempatkan sektor perikanan tangkap sebagai basis yang luas dan berprospek di sebagian besar pesisir, sementara budi daya terkonsentrasi di klaster tertentu (Kecamatan Kelumpang dan Kecamatan Pamukan) sebagai basis yang rentan saturasi. Hasil Tipologi Klassen menegaskan bahwa mayoritas wilayah perikanan Kotabaru berada pada posisi maju dan tumbuh pesat (Kuadran I), mengonfirmasi potensi ekonomi maritim yang sangat kuat. Namun, Analisis *Shift-Share* (SSA) menyajikan gambaran dinamis yang kritis, menunjukkan bahwa Sektor Budi daya secara struktural menghadapi tekanan perlambatan pertumbuhan makro (nilai M negatif merata). Meskipun demikian, Subsektor Budi daya menunjukkan resiliensi luar biasa di Kuadran II SSA (*Slow Growth, Competitive*) seperti Kelumpang Selatan/Hilir, yang membuktikan adanya keunggulan kompetitif lokal (L positif) yang berhasil melawan tren pasar eksternal yang lesu. Sebaliknya, Sektor Tangkap yang dinamis juga mengandung kerentanan, di mana wilayah seperti Pulau Sembilan berada di Kuadran III SSA (*Rapid Growth, Non-Competitive*), mengindikasikan adanya kesempatan yang hilang akibat inefisiensi logistik atau SDM yang menghambat daya saing lokal. Secara strategis, temuan ini mengarahkan kebijakan untuk fokus pada Akselerasi Kuadran I Budi daya (Pamukan Selatan/ Sampanahan) dan Revitalisasi Kuadran II yang resilien, serta Reformasi Struktural untuk mengatasi L negatif di Kuadran III Tangkap. Perumusan kebijakan Ekonomi Biru Kotabaru harus meninggalkan pendekatan seragam, melainkan menerapkan kebijakan ekonomi biru asimetris berbasis kuadran untuk mengintegrasikan potensi sumber daya laut dengan daya saing wilayah.

Rekomendasi Kebijakan

Pemerintah Kabupaten Kotabaru harus mengadopsi kerangka kebijakan Ekonomi Biru Asimetris yang secara tegas membedakan alokasi sumber daya dan intervensi sosial berdasarkan kinerja Kuadran SSA dan Tipologi Klassen di setiap wilayah. Untuk Subsektor Perikanan Tangkap, yang didominasi oleh Kuadran I (*rapid growth, competitive*), kebijakan harus berfokus pada peningkatan daya saing komersial dan perluasan pasar. Hal ini diwujudkan melalui pembangunan dan modernisasi pelabuhan perikanan yang berstandar logistik tinggi di wilayah Kuadran I, disertai dengan program pelatihan vokasional untuk nelayan dan operator kapal agar mampu menerapkan teknologi tangkap berkelanjutan dan memenuhi standar mutu ekspor, sehingga manfaat pertumbuhan sektor tersebut (M+) dapat dirasakan maksimal oleh masyarakat lokal.

Sebaliknya, wilayah di Kuadran III (*rapid growth, non-competitive*), seperti kecamatan kepulauan tertentu, memerlukan program reformasi struktural yang didukung intervensi sosial spesifik. Kebijakan harus menargetkan pemotongan biaya operasional bagi nelayan melalui subsidi bahan bakar atau pembangunan *cold storage* bersama di sentra produksi terdekat, sekaligus memberikan pelatihan kewirausahaan dan keahlian teknis agar masyarakat lokal tidak hanya menjadi pekerja tetapi juga pemilik rantai nilai, sehingga mengurangi kesempatan yang hilang (L negatif) yang selama ini terjadi. Selain itu, secara umum Pemerintah Kabupaten Kotabaru dapat melakukan moratorium alat tangkap di perairan sempit & membangun *crap apartment* dan Bank Benih di Kawasan mangrove Teluk Kelumpang sebagai bagian dari konservasi dan memulihkan stok rajungan di alam. Adapun terkait sedimentasi tambang dan limbah sawit yang merusak *nursery ground* (tempat pemijahan ikan), Pemerintah diharapkan dapat membuat regulasi dengan mewajibkan Perusahaan tambang dan sawit membangun *sediment trap* (jebakan lumpur) bertingkat sebelum air larian masuk ke sungai/ laut.

Untuk Subsektor Budi daya, yang sebagian besar berada di bawah tekanan makro (M-), prioritas kebijakan harus dialihkan kepada proteksi resiliensi dan penciptaan sentra keunggulan baru. Wilayah Kuadran II (*slow growth, competitive*), khususnya Kelumpang Selatan, Kelumpang Hilir, dan Pulaulaut Timur, harus ditetapkan sebagai Zona Proteksi Resiliensi, di mana investasi difokuskan pada penguatan koperasi, pemberian insentif sertifikasi mutu (misalnya CBIB), dan dukungan kebijakan anti-monopoli pakan untuk menjaga keunggulan kompetitif (L+) mereka dari guncangan harga eksternal. Pemerintah diharapkan dapat membuat regulasi terkait pengolahan produk budi daya baik *primary processing* ataupun program subsidi sertifikasi produk.

Sementara itu, wilayah Kuadran I Budi daya (Pamukan Selatan dan Sampanahan) harus dijadikan target Akselerasi Cepat melalui penyediaan akses permodalan yang mudah, bantuan teknologi *smart-farming*, dan pembukaan kemitraan hilirisasi dengan industri pengolahan pakan atau produk olahan berorientasi ekspor. terakhir, wilayah Kuadran IV (*slow growth, non-competitive*), yang tersebar luas di kedua subsektor dan mencakup mayoritas kecamatan kepulauan dan *hinterland*, memerlukan kebijakan Diversifikasi Sosial-Ekonomi Inklusif. Daripada memaksakan sektor perikanan yang tidak kompetitif, dana pemerintah harus dialihkan untuk program padat karya yang berbasis pada potensi lokal alternatif, seperti ekowisata bahari atau pengembangan kerajinan pesisir, disertai dengan peningkatan akses TIK (seperti yang diidentifikasi dalam kajian ekosistem digital) untuk meningkatkan kapasitas literasi keuangan dan digital masyarakat Kuadran IV, memastikan bahwa transformasi Ekonomi Biru Kotabaru benar-benar inklusif dan tidak meninggalkan kelompok rentan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ucapkan terima kasih pada Dinas Perikanan Kabupaten Kotabaru yang telah bersedia memberikan data hasil produksi perikanan tangkap dan budi daya di Kabupaten Kotabaru periode 2020-2024 sehingga dapat diolah serta disajikan dalam penelitian ini.

PENYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

Dengan ini kami menyatakan bahwa kontribusi setiap penulis dalam penulisan naskah ini adalah: Hana Apriliani kontributor utama, Edgar Bayu Refansyah anggota, Rachmat Hidayat anggota. Para penulis menyatakan bahwa Surat Pernyataan Kontribusi Penulis telah dilampirkan.

DAFTAR PUSTAKA

Arsyad, L. (1999). *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. BPFE.

Amatillah, M., Sari, S. P., Regita, A., & Muis, C. (2023). The Blue Economy as Key to Coastal Development in Small Island Developing States (SIDS). *Journal of World Trade Studies* 8(2).

Bappenas. (2023). *Indonesia Blue Economy Roadmap* (2nd ed.). Kementerian PPN/Bappenas.

p-ISSN: 2088-8449
e-ISSN: 2527-4805

https://perpustakaan.bappenas.go.id/elibrary/file_upload/koleksi/dokumenbappenas/konten/Upload%20Terbaru/EBOOK%20ENG%2017102024_Indonesia%20Blue%20Economy%20Roadmap-2nd%20Edition.pdf.

Bapperida Kotabaru. (2024). *Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotabaru 2025-2045*.

Basuki, M. (2017). Analisis Sektor Unggulan Kabupaten Sleman dengan Metode Shift Share dan Location Quotient. *Jurnal Sains, Teknologi Dan Industri*, *15*, 52-60. http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/sitekin.

Bennett, N. J., Cisneros-Montemayor, A. M., Blythe, J., Silver, J. J., Singh, G., & Sumaila, U. R. (2019). Just Tranformation to Sustainability. *Sustainability*, 14 (11), 3881. https://doi.org/10.3390/su11143881.

Bista, S., & Karki, T. (2022). Legal Instruments In Fisheries Sector Of Nepal. *Reviews In Food and Agriculture*, *3*(2), 62–66. https://doi.org/10.26480/rfna.02.2022.62.66.

BPK RI. (n.d.). *Profil Kabupaten Kotabaru*. https://kalsel.bpk.go.id/profil-kabupaten-kotabaru/.

Cisneros-Montemayor, A. M., Moreno-Báez, M., Reygondeau, G., Cheung, W. W. L., Crosman, K. M., González-Espinosa, P. C., ... Ota, Y. (2021). Enabling conditions for an equitable and sustainable blue economy. *Nature*, *591*(7850), 396–401. https://doi.org/10.1038/s41586-021-03327-3.

Cohen, J. P., Allison, H. E., Andrew, L.N., Cinner, J.,.... Ratner, B.D. (2019). Securing a Just Space for Small-Scale Fisheries in the Blue Economy. *Frontiers in Marine Science*. 171 (6). https://doi.org/10.3389/fmars.2019.00171.

Duda, J. J., Torgersen, C. E., Brenkman, S. J., Peters, R. J., Sutton, K. T., Connor, H. A., ... Pess, G. R. (2021). Reconnecting the Elwha River: Spatial Patterns of Fish Response to Dam Removal. *Frontiers in Ecology and Evolution*, *9*. https://doi.org/10.3389/fevo.2021.765488.

European Commission. (2021). *Committee And The Committee Of The Regions on a new approach for a sustainable blue economy in the EU Transforming the EU's Blue Economy for a Sustainable Future*.

Hidayat, P., & Kholis, M. (2020). Analisis penetapan sektor unggulan perekonomian Kota Binjai. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, 28*(1), 45–56.

Hidayat, R., Zainuddin, M., Safruddin, & Wiyono, E. S. (2022). Identification of potential areas for upwelling based on characteristics of eddies event in the Bone gulf. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, *1119*(1). https://doi.org/10.1088/1755-1315/1119/1/012083.

Iberahim. (2013). Upaya Pemerintah Kabupaten Kotabaru dalam Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Nelayan di Kecamatan Pulau Laut Utara. *Jurnal Ilmu Politik dan pemerintahan Lokal*. 2 (2).

Glasson, J. (1978). *An introduction to regional planning : Concepts, theory and practice* (2nd ed.). Hutchinson.

Jumiyanti, K. R. (2018). Analisis Location Quotient dalam Penentuan Sektor Basis dan Non Basis di Kabupaten Gorontalo. *Gorontalo Development Review*.

Kaunar, H., Hartoko, A., & Ghofar, A. (2022). Status Pemanfaatan Sumberdaya Rajungan (Portunus pelagicus) di Perairan Kabupaten Kotabaru. *Jurnal Pasir Laut*, 6(1), 26-34

Keen, M. R., Schwarz, A. M., & Wini-Simeon, L. (2018). Towards defining the Blue Economy: Practical lessons from Pacific Ocean governance. *Marine Policy*, *88*, 333–341. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2017.03.002

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). (2022). *Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020-2024 (Perubahan)*. KKP.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). (2024). *Laporan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023*.

MC Kalsel. (2024, October 7). *Gubernur Kalsel Sampaikan Potensi Perairan Kalsel Untuk Ekonomi Biru*. https://kalselprov.go.id/berita/.

Mulazzani, L., & Malorgio, G. (2017). Blue Growth and Ecosystem Services. *Marine Policy*, 85, 17–24. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2017.08.006

Kurniati, N. (2020). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Struktur Perekonomian Wilayah Kota Mataram. Media Bina Ilmiah. *Media Bina Ilmiah*, *15*(1), 3799–3806.

Musdalifah, N.A., Darwis, D., & Nugraha, I. F. (2024). Strategi Indonesia dalam Mencapai Blue Economy Roadmap Melalui National Blue Agenda Actions Partnership (NBAAP). *Student Scientific Creativity Journal*, *2*(6), 53–65. https://doi.org/10.55606/sscj-amik.v2i6.4460

Pemerintah Kabupaten Kotabaru. (2018). *Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 – 2038*.

Pemerintah Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2020 Tentang Rencana Zonasi Kawasan Antar wilayah Selat Makassar*.

Pribadi, Y., & Nurbiyanto. (2021). *Pengukuran Daya Saing Kabupaten Lampung Tengah: Metode Location Quotient Dan Shift-Share Analysis Central Lampung Regency Competitiveness Measurement: Location Quotient and Shift-Share Analysis*.

Riana, A. D., Rahmatia, R., Madris, M., Saudi, N. D. S., & Yusuf, M. (2025). *Blue Economy Model to Increasing Coastal Community Income,*

Employment, and GRDP in South Sulawesi. 1085–1100. https://doi.org/10.2991/978-94-6463-758-8_89.

Rizani, A. (2021). Analisis potensi ekonomi di sektor dan subsektor pertanian, kehutanan dan perikanan Kabupaten Jember. *Jurnal Ekonomi Pembangunan, 19*(1), 1–15.

Sari, N. R., & Syafii, M. (2021). Analisis Sektor Unggulan Perekonomian di Provinsi Jawa Timur dengan Pendekatan Sektor Pembentuk PDRB. *Jurnal Ekonomi Pembangunan,* 19 (2).

Syahdan, M., Tony, F., & Nursalam. (2023). Persentase Pemutihan Karang (Coral Bleaching) di Perairan Desa Sarang Tiung Kabupaten Kotabaru. *Jurnal Kelautan Tropis*, 26(1), 55-64.

TVRINews. (2022, 5 Agustus). *Air Hitam dan Berbau, Perusahaan Sawit diduga Cemari Sungai Sampanahan*. https://tvrinews.com/id/berita/t8s45gi-air-hitam-dan-berbau-perusahaan-sawit-diduga-cemari-sungai-sampanahan.

Urban, E.R., Jr., & Ittekkot, V. (2022). Blue Economy and Ocean Science: Introduction. Blue Economy: An Ocean Science Perspective (pp. 1-20). *Springer Nature Singapore*.